


Etnisitas, Demokrasi Lokal, dan Komunikasi Politik: Praktik Mobilisasi pada Pilkada Maluku Tengah

Ethnicity, Local Democracy, and Political Communication: Mobilization in the Maluku Tengah Election

 <https://doi.org/012345678/vol16iss2pp206-220>

Hijrah^{1*}, Said Lestalu², La Jaali³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*hijrahilkom2017@gmail.com

Abstract

This article explores the intersection of ethnicity, local democracy, and political communication in the context of the 2017 regional election (Pilkada) in Central Maluku Regency, with a specific focus on political mobilization practices in Leihitu District. The study investigates how inter-ethnic relations—particularly between the Leihitu and Seram communities—shaped strategic patterns of political communication in advancing local political interests. Employing a qualitative methodology, data were collected through in-depth interviews with key informants directly involved in the processes of political communication and mobilization. Findings indicate that ethnic sentiment played a pivotal role in forming strategic alliances between the Leihitu and Seram ethnic groups. Political communication unfolded in three key phases: the establishment of ethnic organizations as platforms for regional autonomy aspirations; elite consolidation during the pre-candidacy phase; and the mobilization of support for the “empty box” option during the campaign stage as a form of resistance to entrenched political dynasties. These practices illustrate that political communication functioned not merely as a vehicle for information exchange, but as a mechanism for collective identity-based mobilization and resistance. This study offers a novel contribution by demonstrating how ethnic-based political communication can reconfigure local political power through the articulation of shared agendas, such as demands for regional autonomy and opposition to dynastic politics. The findings underscore the importance of recognizing ethnic dynamics in local democratic processes, highlighting the need for decentralization policies that ensure social justice and effective political representation at the grassroots level.

Keywords: *Ethnic-Based Political Communication, Political Mobilization, Identity Politics, Regional Autonomy, Local Democracy*

Info Artikel

Naskah diterima: 04/07/2023

Revisi terakhir: 03/09/2023

Disetujui: 18/09/2023

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokrasi lokal di Indonesia seringkali dipersepsikan semata-mata sebagai arena kontestasi elektoral (Irwan et al., 2022). Namun, di balik permukaannya yang formal, Pilkada menyimpan dinamika sosial-politik yang jauh lebih kompleks, terutama dalam masyarakat yang majemuk secara etnis dan budaya. Di Maluku Tengah, khususnya Kecamatan Leihitu, Pilkada tahun 2017 menjadi cermin bagaimana relasi etnis, memori kolektif, dan aspirasi politik lokal bersilangan dalam ruang yang sama. Sentimen etnis yang menyatu dengan aspirasi pemekaran wilayah dan resistensi

terhadap hegemoni dinasti politik telah membentuk konfigurasi komunikasi politik yang khas dan sarat makna (Masnun, 2023; Soedirgo, 2021). Dalam konteks ini, persoalan utama yang diangkat adalah bagaimana komunikasi politik berbasis etnis berlangsung dalam rangka mobilisasi kekuatan politik masyarakat, serta sejauh mana praktik tersebut mampu memengaruhi dinamika demokrasi lokal.

Fenomena tersebut penting dikaji karena ia tidak hanya menunjukkan wajah lain dari demokrasi elektoral, tetapi juga membuka ruang perbincangan tentang bagaimana masyarakat lokal memaknai dan mengelola kekuasaan (Nguyễn et al., 2023). Fakta lapangan menunjukkan bahwa etnis Leihitu dan Seram membentuk aliansi strategis yang dimediasi oleh organisasi etnis, dan bersama-sama menggalang dukungan terhadap kotak kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap kandidat petahana. Ini bukan sekadar bentuk abstensi politik, tetapi sebuah strategi komunikasi yang mengandung pesan politik kuat: perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak mewakili aspirasi kolektif. Proses ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari sejarah ketimpangan pembangunan, marginalisasi dalam struktur kekuasaan, dan ketegangan antar kelompok etnis yang telah lama berakumulasi.

Kajian tentang komunikasi politik dalam Pilkada telah banyak dilakukan, tetapi masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda. Misalnya, studi oleh Festianto & Usboko (2021) dan Syofian et al. (2020) menunjukkan bahwa komunikasi politik adalah medium krusial dalam proses demokratisasi dan transformasi sosial. Dalam konteks lokal, Sasmita (2023) dan Suwoko (2022) menyoroti bagaimana komunikasi politik dapat memperkuat identitas politik komunitas etnis tertentu di Papua dan di Kalimantan, sementara penelitian Syofian et al. (2020) menggambarkan praktik serupa di Sumatera Utara, di mana etnisitas menjadi modal penting dalam kontestasi kepala daerah. Penelitian Syofian et al. (2020) juga menemukan bahwa simbolisme etnis dan jaringan kekerabatan memainkan peran signifikan dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat di daerah-daerah perifer.

Penelitian oleh Siahaan et al. (2020) dan Zaini et al. (2023) menyatakan bahwa politik lokal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik-praktik patronase dan aliansi informal yang seringkali berbasis pada identitas primordial. Demikian pula, studi oleh Dinarto & Ng (2021) dan Mitra & Pal (2022) menunjukkan bahwa mobilisasi etnis dalam pemilu lokal di Indonesia cenderung meningkat ketika aspirasi politik masyarakat tidak terakomodasi oleh elite penguasa. Dalam skala yang lebih luas, studi Firmansyah & Kurniawan (2021) dan Nugroho & Windyastuti (2021) tentang etnisitas dan konflik politik menyatakan bahwa dalam masyarakat plural, perbedaan etnis seringkali menjadi dasar pengorganisasian politik. Hal ini diperkuat oleh temuan Ali et al. (2022) yang mengungkap bagaimana politik identitas memainkan peran dalam pembentukan aliansi politik elektoral di Indonesia.

Selain itu, penelitian Fox (2022) dan Suwoko (2022) memperlihatkan bahwa fragmentasi etnis dapat memicu konflik maupun konsolidasi politik tergantung pada pola komunikasi dan kepentingan bersama yang dimediasi oleh elite lokal. Dalam konteks demokrasi elektoral, Prabowo et al. (2020) dan Susanti (2021) mencatat bahwa kampanye berbasis identitas dapat memperkuat solidaritas komunitas, namun juga berpotensi

menajamkan eksklusivitas politik. Di sisi lain, kajian Qodir et al. (2022) dan Taufiq et al. (2022) menyatakan pentingnya memahami dimensi sosial-budaya dari partisipasi politik, terutama di wilayah-wilayah dengan heterogenitas etnis yang tinggi. Studi-studi ini menyajikan beragam perspektif tentang bagaimana komunikasi politik berlangsung dalam ruang demokrasi yang dipengaruhi oleh relasi etnis dan sejarah lokal.

Meski demikian, masih jarang ditemui kajian yang secara mendalam mengelaborasi proses komunikasi politik antar kelompok etnis dalam konteks mobilisasi politik berbasis aspirasi pemekaran daerah dan resistensi terhadap dinasti politik, seperti yang terjadi di Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Kebanyakan studi berhenti pada analisis elektoral atau pola perilaku memilih, dan belum menyentuh bagaimana organisasi etnis digunakan sebagai alat komunikasi politik yang terstruktur dan strategis. Bahkan lebih jarang lagi ditemukan penelitian yang menempatkan kotak kosong sebagai simbol perlawanan politik kolektif berbasis etnis.

Dalam ruang itulah, penelitian ini mengambil posisi: menggali secara kritis praktik komunikasi politik yang berakar pada relasi etnis Leihitu dan Seram dalam Pilkada Maluku Tengah. Dengan memusatkan perhatian pada tahap-tahap penting seperti pembentukan organisasi etnis, konsolidasi elite sebelum kandidasi, dan mobilisasi massa saat kampanye, kajian ini menawarkan pembacaan yang berbeda tentang bagaimana demokrasi lokal dipraktikkan dan dimaknai di tingkat akar rumput. Di sinilah letak kebaruannya—bahwa komunikasi politik bukan semata pertukaran pesan, tetapi sebuah arena perjuangan makna, identitas, dan harapan kolektif yang dilakoni oleh masyarakat yang lama merasa terpinggirkan dari pusat kekuasaan lokal.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik antar kelompok etnis terjalin dalam proses mobilisasi politik pada Pilkada Maluku Tengah 2017, serta bagaimana praktik tersebut merepresentasikan perjuangan politik etnis dalam kerangka demokrasi lokal. Penelitian ini tidak hanya ingin menggambarkan proses komunikasi politik yang terjadi, tetapi juga menelisik bagaimana makna perlawanan dibangun secara kolektif oleh masyarakat, dan bagaimana demokrasi lokal diinterpretasikan dari perspektif etnis yang menginginkan ruang dan pengakuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pilihan terhadap pendekatan kualitatif bukanlah sekadar pertimbangan metodologis, melainkan lahir dari kesadaran bahwa fenomena komunikasi politik berbasis etnis, sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Maluku Tengah 2017, tidak dapat direduksi menjadi angka dan statistik semata. Ia memerlukan pendekatan yang mampu menangkap nuansa, makna simbolik, serta konteks historis dan sosial yang melingkupi tindakan-tindakan politik masyarakat. Seperti dinyatakan oleh Denzin & Lincoln (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dari perspektif aktor sosial itu sendiri, dan dalam konteks ini, mendengarkan suara dari komunitas Leihitu dan Seram menjadi prioritas utama dalam menjelaskan bagaimana komunikasi politik

dijalankan.

Kecamatan Leihitu di Kabupaten Maluku Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini menjadi episentrum perlawanan politik yang dilakukan melalui jalur elektoral non-konvensional, yakni dukungan terhadap “kotak kosong.” Di sinilah terlihat bagaimana komunitas lokal memobilisasi identitas etnis dalam ranah demokrasi, memanfaatkan organisasi sosial berbasis etnis, dan menegosiasikan ulang relasi kuasa di level lokal. Selain itu, Leihitu merepresentasikan wilayah dengan sejarah panjang relasi antar kelompok etnis dan pengalaman marginalisasi pembangunan, menjadikannya medan yang tepat untuk menelusuri bagaimana dinamika etnis dan komunikasi politik saling berkait (Yin, 2018).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari 14 orang informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses mobilisasi politik dan komunikasi antaretnis selama Pilkada 2017. Para informan mencerminkan keragaman aktor yang terlibat dalam dinamika politik lokal: empat di antaranya merupakan tokoh adat dan pimpinan organisasi etnis dari kelompok Leihitu dan Seram, yang memainkan peran sentral dalam pengorganisasian massa serta penyusunan strategi politik; tiga lainnya adalah tokoh masyarakat dan pemuda yang aktif dalam kampanye informal dan advokasi pemekaran daerah. Di samping itu, empat warga biasa yang berasal dari desa-desa strategis turut dilibatkan untuk menggali perspektif akar rumput terhadap dinamika etnis dan preferensi politik yang berkembang, sementara dua akademisi lokal dan satu mantan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan diposisikan sebagai informan triangulatif untuk memperkuat validitas data. Pemilihan informan dilakukan secara berlapis guna menjamin keberagaman sudut pandang serta kedalaman informasi, sekaligus menangkap relasi antara elite dan masyarakat biasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Malik (2022), pendekatan purposive memungkinkan peneliti menggali data yang paling relevan dan bermakna sesuai fokus kajian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar para informan dapat menuturkan pengalaman dan pandangan mereka secara leluasa, dalam bahasa Indonesia maupun sesekali menggunakan dialek lokal untuk membangun suasana akrab dan saling percaya. Setiap sesi berlangsung antara 45 hingga 90 menit, memberikan ruang untuk menjangkau makna-makna subjektif dan narasi politik yang kerap luput dari diskursus formal (Vindrola-Padros & Johnson, 2020). Observasi partisipatif terbatas dilakukan di berbagai lokasi strategis seperti posko kampanye, tempat diskusi komunitas, dan acara sosial warga, dengan mencatat gestur, simbol, serta bentuk komunikasi non-verbal yang muncul dalam interaksi sosial. Teknik ini berfungsi memperkaya data wawancara sekaligus membantu memahami konteks sosial-budaya tempat berlangsungnya komunikasi politik (Oe et al., 2022). Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi seperti hasil pemilu, arsip media lokal, bahan kampanye,

serta catatan internal organisasi etnis. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berguna untuk memverifikasi informasi dari para informan, tetapi juga melacak jejak historis dari dinamika etnis-politik yang menjadi fokus kajian.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi metode dan sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara dengan hasil observasi lapangan dan dokumen. Misalnya, klaim mengenai dukungan terhadap kotak kosong diverifikasi dengan data pemilu dan berita lokal yang mencatat perolehan suara serta respons dari elite politik. Selain itu, perbedaan pandangan antara elite dan warga biasa juga diuji silang untuk melihat kesenjangan atau keselarasan persepsi. Seperti dijelaskan oleh Bans-Akutey & Tiimub (2021), triangulasi dalam penelitian kualitatif bukan hanya alat verifikasi, tetapi juga strategi untuk memperkaya pemahaman terhadap fenomena kompleks.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), mengikuti tahapan yang diajukan oleh Braun & Clarke (2016), yaitu: familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, dan penulisan hasil. Proses ini dilakukan secara iteratif, dengan membaca ulang transkrip wawancara dan catatan lapangan untuk menemukan pola makna, simbol politik, serta narasi etnis yang dominan dalam proses mobilisasi politik. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti bagaimana komunikasi politik dibentuk tidak hanya oleh rasionalitas elektoral, tetapi juga oleh ingatan kolektif, kekecewaan struktural, dan solidaritas etnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Etnis sebagai Modal Sosial Politik Lokal

Dalam konteks politik lokal di Kecamatan Leihitu, identitas etnis tidak sekadar hadir sebagai ekspresi kebudayaan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi modal sosial yang memiliki daya mobilisasi kuat dalam kontestasi politik. Etnis Leihitu dan Seram, yang memiliki sejarah relasi panjang dalam ranah sosial dan ekonomi, menunjukkan bagaimana afiliasi etnis dapat menjadi fondasi strategis untuk membangun jejaring politik yang solid. Dalam Pilkada Maluku Tengah 2017, keterikatan ini mengambil bentuk yang lebih artikuler—yakni dengan munculnya organisasi-organisasi berbasis etnis seperti Forum Pemuda Leihitu (FPL) dan Ikatan Pemuda Seram (IPS). Kedua organisasi ini tidak hanya menjadi wadah penyalur aspirasi pemuda, tetapi juga menjadi simpul penting dalam mengorkestrasi pergerakan politik komunitas masing-masing.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh pemuda Leihitu, ia menjelaskan bahwa: “Forum ini awalnya untuk kegiatan sosial dan kepemudaan, tapi dalam Pilkada kemarin, kita merasa harus ambil sikap politik. Bukan untuk siapa-siapa, tapi demi masa depan Leihitu. Kita sudah terlalu lama hanya jadi penonton.” (Wawancara, 2023). Narasi ini menunjukkan adanya transformasi peran sosial menjadi peran politik berbasis etnis, di mana organisasi yang sebelumnya bersifat kultural kemudian menjadi instrumen mobilisasi dan artikulasi kepentingan kolektif dalam medan politik lokal.

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini. Di beberapa lokasi strategis di Kecamatan Leihitu, terlihat spanduk-spanduk dan simbol lokal yang dipasang oleh komunitas pemuda dengan pesan-pesan politis yang menyiratkan dukungan terhadap gerakan “kotak kosong” dan desakan pemekaran wilayah. Aktivitas diskusi politik juga rutin dilakukan di rumah-rumah tokoh masyarakat atau di balai desa yang difasilitasi oleh anggota organisasi etnis. Hal ini menunjukkan adanya proses intensifikasi komunikasi politik horizontal yang memperkuat kohesi sosial-politik antaranggota kelompok.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka *resource mobilization theory*, yang memandang gerakan sosial dan politik tidak hanya digerakkan oleh ketidakpuasan, tetapi juga oleh kemampuan kelompok dalam mengelola sumber daya kolektif, termasuk identitas etnis (Sabarudin, 2021; Sasmita, 2023; I. Siregar, 2023). Dalam hal ini, identitas etnis Leihitu dan Seram menjadi *resources* yang dimobilisasi secara strategis untuk menggalang dukungan, memperluas jaringan, dan menyampaikan agenda politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Auerbach (2022) yang menolak memahami etnisitas sebagai entitas tetap, tetapi sebagai *category of practice*—yang bisa diaktivasi dalam konteks tertentu sebagai alat politik. Etnisitas bukanlah esensi yang inheren, melainkan alat kategorisasi yang bersifat situasional dan performatif.

Lebih lanjut, teori identitas kolektif menjelaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan politik sering kali ditentukan oleh seberapa kuat identitas kelompok dapat didefinisikan dan dibingkai sebagai bagian dari perjuangan bersama (Grover & Kuo, 2023). Dalam kasus ini, identitas etnis tidak hanya diperkuat melalui kesamaan budaya, tetapi juga melalui narasi penderitaan kolektif akibat ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan representasi politik. Identitas etnis kemudian dipolitisasi untuk mempersatukan aspirasi dan memperluas ruang gerak dalam arena politik lokal.

Pada titik ini, pendekatan *ethnic boundary-making* yang dikembangkan oleh Synnes (2022) menjadi sangat relevan. Ia menyatakan bahwa batas etnis tidak selalu bersifat tetap, melainkan hasil negosiasi dan konstruksi sosial yang dapat berubah tergantung pada dinamika politik dan sosial. Dalam konteks Pilkada Maluku Tengah, aliansi antara etnis Leihitu dan Seram menunjukkan pergeseran batas-batas etnis yang selama ini dianggap rigid. Aliansi ini dibangun bukan karena kesamaan asal-usul, tetapi karena kesamaan aspirasi dan ketidakpuasan terhadap dominasi dinasti politik. Dalam praktiknya, batas etnis menjadi fleksibel dan dimobilisasi secara fungsional untuk membentuk blok politik yang lebih besar dan lebih berpengaruh.

Temuan ini menawarkan refleksi penting: bahwa komunikasi politik berbasis etnis tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi atau politik sektarian. Justru dalam konteks lokal seperti di Maluku Tengah, di mana relasi kuasa sering kali tersentralisasi dan dinasti politik menguat, mobilisasi etnis dapat menjadi bentuk ekspresi alternatif dari demokrasi yang partisipatif dan berbasis pada kebutuhan akar rumput. Identitas etnis, ketika dipolitisasi secara inklusif dan diarahkan pada agenda kolektif seperti pemekaran wilayah dan keadilan pembangunan, dapat menjadi sarana untuk memperluas

ruang demokrasi dan menegosiasikan ulang distribusi kekuasaan.

Komunikasi Politik dalam Ruang Etnis: Strategi dan Konsolidasi

Dalam Pilkada Maluku Tengah 2017, komunikasi politik yang terjadi di Kecamatan Leihitu bukan semata-mata soal pertukaran informasi politik biasa. Ia merupakan proses yang dikemas dalam bingkai kultural dan sosial, yang memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi dibentuk secara segmentatif dan simbolik melalui jejaring etnis. Proses ini dimulai jauh sebelum masa kampanye, bahkan sejak tahap pra-kandidasi, ketika elite etnis dari Leihitu dan Seram melakukan konsolidasi untuk membahas dinamika politik daerah dan masa depan representasi komunitas mereka. Konsolidasi ini bukanlah pertemuan formal yang tercatat dalam dokumen resmi, melainkan berlangsung dalam pertemuan-pertemuan informal, seperti pertemuan adat, pertemuan keluarga besar, hingga obrolan strategis antara tokoh masyarakat dan pemuda di rumah-rumah warga atau di sekretariat organisasi pemuda.

Dalam salah satu wawancara dengan tokoh adat Leihitu, tergambar bagaimana pertemuan antara para tetua dan pemuda berlangsung hangat namun penuh kesadaran politik. Menurutnya, terdapat kesepakatan bahwa komunitas Leihitu dan Seram tidak akan memberikan dukungan terhadap calon tunggal yang mencerminkan dominasi politik lama. Narasi “tidak ingin menjadi pelengkap politik dinasti” menjadi kalimat yang terus diulang dalam forum-forum internal tersebut. Sebaliknya, mereka menyuarakan dukungan terhadap kotak kosong sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni elite kabupaten yang dianggap tidak akomodatif terhadap aspirasi wilayah pesisir.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik di tingkat komunitas berjalan sangat cair namun sistematis. Simbol-simbol lokal seperti kain adat, ukiran khas, serta bahasa daerah digunakan dalam berbagai pertemuan komunitas untuk memperkuat rasa identitas bersama dan membingkai gerakan politik sebagai bagian dari perjuangan kolektif. Di salah satu acara yang diselenggarakan oleh Forum Pemuda Seram, misalnya, terlihat bagaimana lagu-lagu perjuangan lokal dinyanyikan sebelum diskusi politik dimulai. Selain itu, narasi yang digunakan dalam media sosial komunitas banyak menekankan pentingnya “menjaga harga diri orang kampung” dan menolak “politik dari pusat yang memaksakan pilihan.”

Pendekatan *strategic political communication* seperti dikembangkan oleh Goldberg & Gustafson (2023) juga menegaskan bahwa komunikasi politik modern tidak hanya terjadi melalui media massa, tetapi juga melalui jalur-jalur informal dan komunitarian, termasuk media komunitas dan jejaring sosial lokal. Di sini, para aktor seperti pemuda, tokoh adat, dan aktivis lokal memainkan peran sentral sebagai komunikator politik yang membangun dan menyebarluaskan narasi perlawanan. Mereka bukan hanya penyampai pesan, tetapi juga perancang makna—mereka menentukan bagaimana narasi perlawanan dirangkai, bagaimana simbol digunakan, dan bagaimana publik lokal diajak untuk berpikir dan bertindak secara kolektif.

Lebih lanjut, dinamika ini dapat dibaca sebagai wujud dari *subaltern counterpublics* sebagaimana dikembangkan oleh Scandrett & Gilfillan (2020), yaitu ruang diskursif alternatif

yang dibentuk oleh kelompok-kelompok marginal untuk mengekspresikan kepentingan mereka yang tidak terakomodasi dalam ruang publik dominan. Dalam hal ini, ruang komunitas etnis di Leihitu dan Seram berfungsi sebagai counterpublics yang menawarkan narasi tandingan terhadap dominasi narasi politik resmi kabupaten yang pro-calon tunggal. Mereka memproduksi dan mendistribusikan wacana alternatif—baik melalui forum diskusi, ritual adat, hingga konten media sosial lokal—yang secara sadar menantang struktur kekuasaan politik yang telah mapan.

Refleksi konseptual atas fenomena ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik berbasis etnis dalam Pilkada Maluku Tengah tidak semata-mata merupakan ekspresi sektarianisme atau kemunduran demokrasi. Justru sebaliknya, ia memperlihatkan dinamika demokrasi lokal yang khas, di mana komunitas-komunitas etnis mampu memproduksi strategi politik yang bersifat kontekstual, simbolik, dan reflektif. Dalam situasi di mana saluran-saluran formal demokrasi dianggap tidak cukup mewakili, komunitas lokal membangun jalur-jalur komunikasi mereka sendiri yang lebih responsif terhadap aspirasi dan nilai-nilai lokal.

Mobilisasi Politik melalui Dukungan terhadap Kotak Kosong

Fenomena dukungan terhadap “kotak kosong” dalam Pilkada Maluku Tengah 2017 merupakan ekspresi politik yang kuat dan penuh makna dari masyarakat akar rumput, khususnya komunitas etnis di Leihitu dan Seram. Berbeda dengan pandangan umum yang memandang “kotak kosong” sekadar sebagai pilihan pasif atau bentuk apatisisme politik, dukungan terhadapnya justru dimobilisasi secara aktif dan kolektif sebagai bentuk resistensi yang sah terhadap dominasi dinasti politik di tingkat kabupaten. Keputusan untuk tidak memilih calon tunggal bukanlah tindakan reaksioner, tetapi strategi politik yang matang, yang dibangun melalui narasi, simbol, dan jaringan sosial berbasis etnis dan komunitas lokal.

Dalam wawancara dengan seorang aktivis muda dari Forum Pemuda Seram, terungkap bahwa gagasan mendukung “kotak kosong” mulai muncul dari kekecewaan terhadap dominasi elite politik yang dianggap mengabaikan aspirasi wilayah pesisir dan pedalaman. Menurutnya, “kotak kosong adalah satu-satunya ruang protes yang tersedia secara sah, dan kami memanfaatkannya sebagai saluran perlawanan terhadap ketimpangan representasi.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kotak kosong tidak lagi dilihat sebagai kekosongan literal, melainkan dipersonifikasikan sebagai simbol perjuangan, representasi keadilan, dan tuntutan terhadap pemekaran wilayah agar komunitas mereka tidak terus-menerus terpinggirkan.

Secara simbolik, “kotak kosong” dibingkai dalam berbagai narasi lokal sebagai tokoh tanpa nama yang mewakili harapan kolektif. Dalam salah satu spanduk buatan komunitas pemuda, terlihat tulisan “Lebih baik kosong daripada dipaksa salah pilih,” menggambarkan bentuk kesadaran politik yang berkembang. Narasi seperti ini tersebar luas melalui media sosial lokal seperti grup WhatsApp keluarga besar, akun Facebook komunitas, hingga forum-forum diskusi daring berbasis desa. Kampanye informal ini lebih kuat dibandingkan kampanye formal kandidat tunggal, karena berlangsung dalam ruang-ruang yang lebih intim dan mengakar dalam keseharian masyarakat.

Observasi lapangan juga menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mendiskusikan pilihan ini. Di beberapa dusun di wilayah Leihitu, terlihat pertemuan kecil warga yang membahas strategi menggalang suara untuk memastikan kotak kosong menang. Di sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai sekretariat komunitas pemuda, tergantung poster-poster berisi kalimat motivasi dan ajakan untuk tidak golput, tetapi memilih “yang tak terlihat demi yang belum terwakili.” Di ruang-ruang ini, identitas etnis berpadu dengan kesadaran politik, membentuk suatu bentuk mobilisasi yang autentik dan reflektif.

Untuk menganalisis fenomena ini, teori *collective identity* dan *resource mobilization* menjadi penting. Dalam kerangka *resource mobilization theory*, gerakan sosial tidak lahir semata-mata karena ketidakpuasan, tetapi juga karena adanya jaringan, organisasi, dan sumber daya yang dimanfaatkan secara strategis Afdhal & Hidayat, (2019) dan Y. A. Siregar & Afdhal (2023). Di sini, jaringan etnis dan komunitas menjadi sumber daya utama yang digerakkan dalam kampanye “kotak kosong”. Sementara itu, *collective identity theory* menjelaskan bahwa identitas bersama menjadi pondasi penting yang membentuk kesadaran dan tindakan kolektif. Komunitas Leihitu dan Seram memaknai “kotak kosong” sebagai bagian dari identitas perjuangan mereka, sebagai simbol yang mempersatukan harapan dan perlawanan.

Konsep *subaltern counterpublics* juga relevan untuk memahami bagaimana kelompok masyarakat ini membentuk ruang diskursif sendiri di luar hegemoni politik kabupaten (Scandrett & Gilfillan, 2020). Ketika suara mereka tidak diakomodasi dalam ruang formal, mereka menciptakan ruang alternatif—baik fisik maupun digital—untuk menyampaikan narasi tandingan. Ruang-ruang ini menjadi ajang artikulasi politik yang inklusif, di mana pengalaman marjinalisasi dibingkai ulang sebagai kekuatan kolektif.

Refleksi konseptual dari dinamika ini menegaskan bahwa dukungan terhadap “kotak kosong” bukan bentuk regresi demokrasi, melainkan ekspresi politik alternatif yang berbasis pada konteks lokal dan kearifan komunitas. Dalam situasi di mana prosedur demokrasi formal tampak tidak menjawab harapan, masyarakat membangun bentuk demokrasi mereka sendiri—demokrasi yang berbasis solidaritas, simbol, dan identitas kolektif. Mereka tidak diam, tidak pula apatis; mereka memilih untuk bergerak dengan cara yang paling bermakna bagi mereka.

Pemekaran sebagai Agenda Kolektif dan Imajinasi Politik Bersama

Dalam pusaran kontestasi politik lokal, isu pemekaran wilayah muncul bukan semata-mata sebagai wacana administratif, melainkan sebagai narasi politik yang menyatukan kelompok etnis Leihitu dan Seram. Di tengah dominasi elite politik kabupaten yang dianggap tidak inklusif dan berjarak dari aspirasi komunitas pinggiran, pemekaran dijadikan sebagai agenda kolektif yang memuat imajinasi tentang keadilan pembangunan, kedaulatan representasi, dan perbaikan tata kelola. Narasi ini tumbuh dari pengalaman bersama atas ketimpangan, keterpinggiran, serta kebutuhan akan ruang politik yang lebih representatif dan otonom.

Dalam sebuah wawancara dengan tokoh adat dari wilayah Leihitu, tersirat harapan besar terhadap pemekaran. Ia menyampaikan bahwa perjuangan pemekaran bukan hanya soal pemisahan administratif, tetapi tentang “mengembalikan harga diri wilayah yang selama ini hanya menjadi angka dalam peta pembangunan.” Pandangan serupa juga diungkapkan oleh seorang anggota diaspora Seram yang aktif dalam diskusi daring. Ia menekankan bahwa pemekaran menjadi simbol bahwa wilayah mereka tak hanya ‘ada’ secara geografis, tapi juga harus ‘diakui’ secara politik. Wacana ini bergerak bukan melalui kanal-kanal resmi, tetapi melalui jaringan diaspora, forum komunitas daring, dan pertemuan adat yang bersifat informal namun intens.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa narasi pemekaran hadir dalam berbagai bentuk. Di rumah-rumah komunitas, terlihat peta usulan pemekaran yang digambar tangan dan ditempel di dinding sebagai pengingat visual perjuangan kolektif. Dalam diskusi di salah satu dusun, terlihat keterlibatan lintas generasi—dari pemuda hingga tokoh tua adat—yang membicarakan tentang kemungkinan wilayah “Leihitu Raya” atau “Seram Utara” sebagai bentuk artikulasi masa depan yang diinginkan. Di sinilah imajinasi politik bekerja: ruang-ruang diskusi tidak lagi hanya memetakan wilayah, tetapi juga membayangkan pemerintahan yang lebih adil, pelayanan publik yang merata, serta pengakuan identitas yang lebih kuat.

Dari sudut pandang teoritik, konsep *imagined communities* membantu menjelaskan bagaimana narasi pemekaran membentuk identitas politik kolektif (Pinem, 2022; Priambodo, 2023). Dalam konteks ini, komunitas Leihitu dan Seram membayangkan diri mereka sebagai entitas politik yang utuh dan berhak atas otonomi. Imajinasi ini tidak dibentuk semata oleh dokumen administratif, melainkan oleh pengalaman bersama, komunikasi simbolik, dan narasi kolektif yang dibangun dari bawah.

Teori resource mobilization juga memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa gerakan pemekaran tidak lahir dari kehampaan, melainkan dari jaringan sosial yang aktif, baik di tingkat lokal maupun diaspora. Forum diskusi daring, pertemuan adat, dan media sosial menjadi infrastruktur penting dalam menyebarkan gagasan, membentuk opini publik, dan membangun konsolidasi. Narasi pemekaran juga mengandung dimensi simbolik yang kuat. Dalam kerangka symbolic interactionism, makna dari “pemekaran” dibentuk dan dibagi melalui interaksi sosial yang sarat nilai dan harapan. Dalam berbagai forum, pemekaran dimaknai sebagai bentuk pembebasan dari subordinasi struktural. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap politik sentralistik yang selama ini dianggap mengabaikan wilayah pesisir dan kepulauan.

Refleksi dari dinamika ini mengarah pada pemahaman bahwa praktik komunikasi politik berbasis etnis dan pemekaran bukanlah bentuk regresi demokrasi atau etnosentrisme, melainkan ekspresi politik alternatif yang kontekstual dan berakar pada pengalaman lokal. Dalam situasi di mana demokrasi prosedural gagal merespons tuntutan keadilan, masyarakat membentuk kanal-kanal baru untuk menyuarakan imajinasi politik mereka. Pemekaran dalam hal ini bukan sekadar produk birokrasi, tetapi manifestasi dari kesadaran kolektif dan peneguhan atas hak menentukan nasib sendiri dalam kerangka negara.

Konfigurasi Baru Demokrasi Lokal: Identitas sebagai Kekuatan Negosiasi Politik

Dalam konteks kontestasi politik di Kabupaten Maluku Tengah, terutama menjelang Pilkada, dinamika antar kelompok etnis menunjukkan transformasi penting dalam wajah demokrasi lokal. Kolaborasi antara komunitas Leihitu dan Seram tidak dibangun atas dasar keseragaman identitas, melainkan pada solidaritas kepentingan yang bersumber dari pengalaman ketidakadilan struktural yang sama. Di sinilah tampak sebuah konfigurasi baru demokrasi lokal: demokrasi yang tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi menjelma sebagai ruang negosiasi identitas, kekuasaan, dan masa depan kolektif.

Wawancara dengan seorang pemuda Leihitu yang aktif dalam jaringan relawan lokal mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas komunitas ini bukan hal instan. Ia menyampaikan bahwa “kami tidak hanya bicara soal siapa calon bupati, tapi bagaimana wilayah kami bisa punya suara yang didengar.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak dilatari oleh loyalitas partisan semata, tetapi oleh kesadaran identitas kolektif sebagai subjek politik yang memiliki kepentingan dan visi. Hal senada juga disampaikan oleh tokoh muda dari komunitas Seram yang mengatakan bahwa “kerja sama ini bukan soal Seram ikut Leihitu, tapi soal kita sama-sama merasa tidak diurus.” Di balik narasi ini tersirat semangat koalisi berbasis kesamaan nasib, bukan kesamaan asal.

Observasi lapangan selama masa konsolidasi menunjukkan bahwa ruang-ruang diskusi tidak lagi bersifat top-down atau sekadar pengarahan, melainkan forum deliberatif yang aktif. Dalam sebuah pertemuan komunitas di salah satu negeri, terlihat bagaimana diskusi antara tokoh adat, pemuda, dan perempuan membicarakan isu-isu lokal seperti akses kesehatan, pendidikan, dan distribusi anggaran pembangunan. Tidak ada hierarki dominan; semua suara didengar dan dimaknai. Praktik ini menandakan bahwa demokrasi lokal telah bergerak dari ruang prosedural menuju ruang partisipatif substantif.

Refleksi konseptual terhadap fenomena ini dapat didekati melalui *theory of deliberative democracy*, yang menekankan bahwa legitimasi demokrasi tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi dari komunikasi rasional dalam ruang publik (Jovanoski & Sharlamanov, 2021; Willis et al., 2022). Dalam konteks Maluku Tengah, komunikasi politik yang dibentuk melalui forum adat, pertemuan komunitas, dan media sosial lokal menjadi arena deliberatif yang memungkinkan lahirnya konsensus baru di luar sistem resmi. Demokrasi di sini bukan sekadar soal menang-kalah dalam pemilihan, tetapi tentang negosiasi bersama atas representasi dan keberlanjutan komunitas. Lebih jauh, melalui lensa *symbolic interactionism*, kita memahami bahwa identitas etnis tidak bersifat statis atau deterministik. Sebaliknya, identitas dibentuk, dinegosiasikan, dan direkonstruksi dalam interaksi sosial (Soedirgo, 2021). Dalam dinamika politik ini, identitas Leihitu dan Seram tidak digunakan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai kekuatan simbolik untuk membangun solidaritas dan memperkuat posisi tawar. Identitas menjadi bahasa politik yang diartikulasikan secara strategis dalam ruang publik lokal.

Akhirnya, mengacu pada gagasan *subaltern counterpublics*, ruang-ruang diskusi komunitas ini dapat dipahami sebagai arena alternatif tempat kelompok terpinggirkan membangun wacana tandingan terhadap dominasi elite kabupaten (Scandrett & Gilfillan,

2020). Di sinilah demokrasi menunjukkan wajah yang lebih plural dan reflektif terhadap keragaman pengalaman sosial. Munculnya koalisi lintas etnis dengan agenda bersama membuktikan bahwa demokrasi lokal tidak berhenti pada sistem formal, tetapi tumbuh dalam budaya lokal dan solidaritas yang terbentuk dari bawah. Dengan demikian, praktik komunikasi politik yang berbasis identitas ini bukan bentuk kemunduran demokrasi, tetapi justru artikulasi dari demokrasi yang lebih kontekstual, reflektif, dan berakar. Identitas menjadi sarana, bukan penghalang; kekuatan untuk berunding, bukan alasan untuk memecah. Dalam konfigurasi baru ini, masyarakat bukan lagi sekadar suara yang dihitung, tetapi jiwa yang hidup dalam politik lokal.

SIMPULAN

Simpulan dari artikel ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks Pilkada Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017, etnisitas bukan semata identitas primordial yang menimbulkan segmentasi, melainkan menjadi modal sosial dan simbol kolektif yang dimobilisasi secara strategis dalam arena politik lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aliansi antara kelompok Leihitu dan Seram dibentuk bukan atas dasar kesamaan budaya semata, melainkan oleh kesadaran politik akan ketimpangan distribusi kekuasaan dan ketidakadilan pembangunan yang mereka alami bersama. Dalam ruang ini, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi elektoral, tetapi telah menjelma menjadi instrumen negosiasi, artikulasi kepentingan, hingga bentuk perlawanan terhadap dominasi elite politik melalui simbol “kotak kosong” dan isu pemekaran wilayah.

Proses mobilisasi yang berlangsung menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak sekadar dijalankan melalui mekanisme prosedural, tetapi lebih dalam lagi, dimaknai sebagai ruang hidup tempat komunitas berunding, membentuk agenda kolektif, dan menegosiasikan masa depan politik mereka sendiri. Kolaborasi lintas etnis dalam memperjuangkan pemekaran dan melawan calon tunggal memperlihatkan bahwa identitas tidak bersifat eksklusif, tetapi terbuka untuk dirundingkan dalam konteks kepentingan bersama. Dengan demikian, praktik komunikasi politik berbasis etnis yang teramati dalam studi ini bukan merupakan regresi demokrasi, melainkan justru bentuk ekspresi demokrasi alternatif yang berakar pada konteks lokal, menyuarakan aspirasi dari bawah, dan memperluas ruang partisipasi politik warga.

Simpulan ini mengonfirmasi bahwa pemahaman terhadap dinamika etnisitas dan komunikasi politik lokal sangat penting bagi kebijakan desentralisasi yang inklusif. Demokrasi lokal yang mengakui kekuatan identitas komunitas dalam proses politik tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan, tetapi juga menjamin bahwa aspirasi politik masyarakat akar rumput menjadi bagian integral dari pembangunan dan representasi yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., & Hidayat, R. (2019). Perlawanan Gerakan Guru Pasca Orde Baru di Indonesia: Studi Pada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 1–16.
- Ali, M., Anismar, A., Rizwan, M., Fajri, F., & Mursalin, M. (2022). Patterns of Political Communication Between Government Institutions and Effect to the Trust of the Acehese People. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 4(2), 144–153.
- Auerbach, K. R. (2022). Accountable to whom? How strong parties subvert local democratic institutions. *Party Politics*, 28(5), 865–878.
- Bans-Akutey, A., & Tiimub, B. M. (2021). Triangulation in research. *Academia Letters*, 2.
- Braun, V., & Clarke, V. (2016). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage Book.
- Dinarto, D., & Ng, J. (2021). Characterising independent candidates in Indonesian local politics. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 266–292.
- Festianto, D., & Usboko, I. (2021). Modality of Chinese Crossbreed Politicians in Local Democratization. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 174–193.
- Firmansyah, M. F., & Kurniawan, A. (2021). Literature Study of Political Communication Based on Politic Identity and Symbolic Interactionism: The Role of Middle Class in Information of Democratization. *THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL: International Journal of Society Development and Engagement*, 5(1), 55–73.
- Fox, C. A. (2022). Visualizing politics in Indonesia: the design and distribution of election posters. *International Journal of Communication*, 16, 4187.
- Goldberg, M. H., & Gustafson, A. (2023). A framework for understanding the effects of strategic communication campaigns. *International Journal of Strategic Communication*, 17(1), 1–20.
- Grover, R., & Kuo, R. (2023). Destabilizing race in political communication: Social movements as sites of political imagination. *Political Communication*, 40(4), 484–503.
- Irwan, I., Zusmelia, Z., & Siska, F. (2022). Portrait of t Democracy Practice and the Identity (Ethnic) Politics Struggle in the Local Political Arena: A Sociology and History Review. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 11(1), 64–72.
- Jovanoski, A., & Sharlamanov, K. (2021). Jurgen Habermas and his contribution to the theory of deliberative democracy. *American International Journal of Social Science Research*, 7(1), 36–47.
- Malik, D. D. (2022). Ethics of Political Communication in Welcoming the Implementation of the 2024 General Election. *Ijd-Demos*, 2(1), 34–50.
- Masnun, L. (2023). Contentious Politics In A Remote Area Of The Mollucan Archipelago. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 49(1).
- Mitra, A., & Pal, S. (2022). Ethnic diversity, social norms and elite capture: theory and evidence from Indonesia. *Economica*, 89(356), 947–996.
- Nguyễn, S., Moran, R. E., Nguyen, T.-A., & Bui, L. (2023). “We never really talked about politics”: Race and ethnicity as foundational forces structuring information disorder within the Vietnamese diaspora. *Political Communication*, 40(4), 415–439.

- Nugroho, K., & Windyastuti, D. (2021). Analysis of patron-client political communication in building a network of political power in the village community. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(1), 110–133.
- Oe, H., Yamaoka, Y., & Ochiai, H. (2022). A Qualitative Assessment of Community Learning Initiatives for Environmental Awareness and Behaviour Change: Applying UNESCO Education for Sustainable Development (ESD) Framework. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3528. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063528>
- Pinem, W. (2022). Ethnic Crossing Politics as a Political Strategy for the Winning Candidate Pair Radiapoh Hasiholan Sinaga & Zonny Waldi in the 2020 Simalungun Regent Election. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 160–174.
- Prabowo, E., Hidayat, D. R., Sugiono, D., & Aly, B. (2020). Political socialisation and political communication in delivering political education and being community aspiration absorber in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6, 235–257.
- Priambodo, B. (2023). Political Marketing Towards the 2024 Local Elections in the Frame of Digital Democracy. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 4(1), 19–24.
- Qodir, Z., Jubba, H., & Hidayati, M. (2022). Contesting ethnic and religious identities in the 2019 Indonesian elections: Political polarization in west Kalimantan. *Studia Islamika*, 29(1), 111–142.
- Sabarudin, D. (2021). Political Communication Based on Identity Politics and Social Networking Media in the Periode 2012-2017 DKI Jakarta Governor Election. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 9(2), 111–125.
- Sasmita, A. S. (2023). Ethnicity and Democracy: Managing Political Complexities in West Papua. *Muslim Politics Review*, 2(1), 112–132.
- Scandrett, E., & Gilfillan, P. (2020). Subaltern Counterpublics. In *Public Sociology as Educational Practice* (pp. 93–108). Bristol University Press.
- Siahaan, C., Samosir, O., & Ali, H. (2020). Political Communication Of Christian Legislative Candidates In Islamic-Based Voters: A Study Of The Legislative General Election In Indonesia Reformed Era Of 1999-2019. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 5776–5786.
- Siregar, I. (2023). Harmonizing Modern and Indigenous Democracy: An Exploration of Traditional Democratic Values in Ethnic Communities of Indonesia. *Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture*, 4(2), 91–101.
- Siregar, Y. A., & Afdhal, A. (2023). Mempertanyakan Klaim Gerakan Sosial: Tinjauan Kritis pada Gerakan Indonesia Mengajar. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(2), 88–105.
- Soedirgo, J. (2021). Quotidian institutions and identity formation: Explaining patterns of identity salience in Maluku, Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 13(1), 56–71.
- Susanti, M. H. (2021). Blusukan Culture and Familism in Local Democracy. *6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*, 306–309.
- Suwoko, S. (2022). Multiculturalism & democracy education in political and cultural based conflict resolution process in East Kalimantan. *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices*, 6(1), 28–38.
- Synnes, R. M. (2022). Dimensions of Ethnic Boundary-Making. *Nordic Journal of Migration*

Research, 12(4), 379–395.

- Syofian, E., Subhilhar, S., Kusmanto, H., & Amin, M. (2020). Identity Politics in the 2018 Regional Head Elections for the Governor and Deputy Governor of North Sumatra. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 3675–3685.
- Taufiq, A., Siahaan, H. M., & Pramono, M. F. (2022). Religious issues as a message in political communications during local elections. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(2), 631–654.
- Vindrola-Padros, C., & Johnson, G. A. (2020). Rapid Techniques in Qualitative Research: A Critical Review of the Literature. *Qualitative Health Research*, 30(10), 1596–1604. <https://doi.org/10.1177/1049732320921835>
- Willis, R., Curato, N., & Smith, G. (2022). Deliberative democracy and the climate crisis. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 13(2), e759.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th (ed.)). SAGE Publications.
- Zaini, A., Sumirat, I. R., & Ridho, M. Z. (2023). Identity Politics in Electoral Politics. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 137–162.